Demoskrasi = Kepemerintahan Berlandaskan Pancasila, atau Demokrasi Pancasila

Salva Ayu Vidiyas Putri

Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia

Salvaayuvp@gmail.com

Abstrak

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokr Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi, Definisi, negara, pancasila

Latar Belakang

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.

Prinsip-prinsip Demokasi Pancasila

1. Kedaulatan

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang

dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan kedua, terjaminnya

2. Kebebasan atau persamaan (Freedom/Equality)

Kebebasan / persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti Free Fight Liberalism yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

Tinjauan Pustaka

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita

hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. (Jakarta: Penerbit LP3ES)

Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.

Macam Macam Demokrasi:

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

1. Berdasarkan ideologi

- a. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu.
- b. Demokrasi rakyat Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar.

2. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

- a. Demokrasi langsung Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat
 - b. Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif)
 - c. Demokrasi perwakilan sistem referendum Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
3. Berdasarkan titik perhatian
 - a. Demokrasi formal
Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
 - b. Demokrasi material
Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan.
 - c. Demokrasi gabungan
Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material.

Kasus Masalah

1. Bagaimana sejarah demokrasi pancasila?

2. Apa unsur unsur demokrasi pancasila?

Pembahasan

perumusan mengenai Demokrasi Pancasila

Berikut ini ada beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa seminar.

- a. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966 Bidang politik dan konstitusionil:

1. Demokrasi pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang–Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali azas–azas Negara–Negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga Negara, di mana hak–hak azasi manusia baik dalam asepek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga–lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan(depersionalization, institutionalization).
2. Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat yang adil dan makmur.
3. Elan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi, yang cukup kuat untuk mendorong Indonesia kearah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan – tuntutan abad ke

Bidang ekonomi:

a. Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas – azas yang minjiwai ketentuan – ketentuan mengenai ekonomi dalam undang – undang dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga Negara, yang antara lain mencakup:

1. Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan Negara.
2. Koperasi.
3. Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.
4. Peranan pemerintah yang bersifat Pembina, penunjuk jalan serta pelindung.

b. Musyawarah Nasional III Persahi: The Rule of Law, December 1966 Azas Negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

1. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kulturil dan pendidikan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
- c. Symposium Hak – hak Azasi Manusia, juni 1967
- d. Istilah demokrasi pancasila ditemukan di dalam Tap MPR No. XXXVII/MPRS/1968.

Kesimpulan

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada

dominasi mayoritas atau minoritas. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. cara penyaluran kehendak rakyat:

- a. Demokrasi langsung Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat
- b. Demokrasi perwakilan
- c. Demokrasi perwakilan sistem referendum
- d. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

Daftar Pustaka

- Dwi, S., Triwahyuningsih, T., & Dikdik Baehaqi Arif, D. B. A. (2012). Demokrasi di Indonesia.
- Martha Arry Bainus Dudi Heryadi, J. (2015). PENGARUH PELAKSANAAN DEMOKRASI TERHADAP KESEJAHTERAAN: TEORI DAN REALITA (STUDI KASUS: INDONESIA). JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, 4
- Ubaidillah, M. P. I. DEMOKRASI DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM.
- Rahman, M. (2017). Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya dalam Konteks Pendidikan Indonesia). Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, 3(2), 13-23.
- Supardan, D. (2015). Sejarah dan prospek demokrasi. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2(2), 125-135.
- Sodik, M. A. (2018). Merokok & Bahayanya.
- Sodik, M. A., & Nzilibili, S. M. M. (2017). The Role Of Health Promotion And Family Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning Program In Health. *Journal of Global Research in Public Health*, 2(2), 82-89.
- Sodik, Muhammad Ali, and Simon Martin Manyanza Nzilibili. "The Role Of Health Promotion And Family Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning Program In Health." *Journal of Global Research in Public Health* 2.2 (2017): 82-89.
- Sodik, Muhammad Ali, Sentot Imam Suprpto, and Dian Pangesti. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsui Orpeha Tulungagung." *STRADA*

- Jurnal Ilmiah Kesehatan* 2.1 (2013): 24-32.
- Sodik, Muhammad Ali. "Merokok & Bahayanya." (2018).
- Sodik, Muhammad Ali. "Sikap Pencegahan Aborsi Ditinjau Dari Pengetahuan Tentang Bahaya Dan Resiko Kesehatan." *Strada Jurnal Kesehatan* <http://publikasi.stikesstrada.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/9-SIKAP-SIKAPPENCEGAHAN-ABORSI.pdf> (2014).
- SODIK, Muhammad Ali. Merokok & Bahayanya. 2018.
- SODIK, Muhammad Ali; NZILIBILI, Simon Martin Manyanza. The Role Of Health Promotion And Family Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning Program In Health. *Journal of Global Research in Public Health*, 2017, 2.2: 82-89.
- SODIK, Muhammad Ali; SUPRAPTO, Sentot Imam; PANGESTI, Dian. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsui Orpeha Tulungagung. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2013, 2.1: 24-32.
- Supriyono, S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). PENTINGNYA PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI MASYARAKAT PESISIR PULAU TERDEPAN SEBAGAI UPAYA KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM BELA NEGARA. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(3).
- Putri, S. A. V. (2021). Adanya perbedaan budaya, agama dan bahasa timbulah rasa saling menghormati, toleransi, dan tercerminnya sila pancasila ke 3.